



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 11050-11057

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Filsafat Sejarah Melayu: Dari Hikayat ke Negara Bangsa Modern

Siti Nurfatimah<sup>1</sup>, Muhammad Rizal Akbar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Department of Tarbiyah, Master's Program in Islamic Education, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

<sup>1</sup>[sitinurfatimah500@gmail.com](mailto:sitinurfatimah500@gmail.com), <sup>2</sup> [abysofyserly@yahoo.com](mailto:abysofyserly@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filsafat sejarah Melayu yang termanifestasi dalam tradisi hikayat serta menelaah transformasinya dalam konteks pembentukan negara bangsa modern. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui penelaahan mendalam terhadap teks-teks klasik hikayat Melayu, karya historiografi modern, serta literatur akademik yang membahas historiografi Melayu, filsafat sejarah, identitas kultural, dan konstruksi negara bangsa. Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi karakter ontologis, epistemologis, dan teleologis sejarah Melayu, sekaligus memetakan pergeseran paradigma historiografis yang muncul seiring dengan masuknya modernisasi dan rasionalisasi sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hikayat tidak semata berfungsi sebagai narasi masa lalu, melainkan sebagai medium simbolik yang menyatukan kekuasaan politik, legitimasi religius, nilai moral, serta kosmologi masyarakat Melayu, di mana kebenaran sejarah ditentukan oleh makna, fungsi sosial, dan legitimasi kolektif, bukan oleh verifikasi faktual semata. Dalam negara bangsa modern, tradisi historiografi Melayu mengalami transformasi signifikan, yakni pergeseran dari sejarah sebagai praksis makna dan narasi sakral-komunal menuju sejarah sebagai instrumen institusional yang bersifat rasional, administratif, dan nasionalistik. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa filsafat sejarah Melayu tidak sepenuhnya tereduksi oleh positivisme sejarah modern, melainkan tetap menyimpan potensi reflektif dan kritis yang penting, khususnya sebagai landasan alternatif dalam memahami sejarah sebagai ruang etis, simbolik, dan identitas kultural dalam diskursus historiografi kontemporer.

**Kata kunci:** Filsafat Sejarah, Historiografi Melayu, Hikayat, Negara Bangsa, Identitas Historis

### 1. Pendahuluan

Sejarah dalam tradisi Melayu merupakan wahana pembentukan nilai, tujuan dan identitas [1]. Dalam khazanah intelektual Melayu, sejarah hidup melalui hikayat, tambo, dan cerita rakyat yang memadukan unsur faktual, simbolik, dan metafisis [2]. Narasi sejarah menunjukkan masyarakat Melayu memiliki cara pandang terhadap masa lalu, dimana sejarah tidak dipahami secara linier dan kronologis, namun sebagai ruang peneguhan moral, legitimasi kekuasaan, dan harmoni kosmis yang berlandaskan adat dan nilai keislaman [3]. Hikayat sebagai medium utama historiografi tradisional Melayu merepresentasikan paradigma ontologis dan epistemologis yang berbeda dari sejarah modern. Dalam hikayat, raja dan istana menempati posisi sentral sebagai subjek sejarah, sementara rakyat tampil sebagai latar sosial yang memperkuat keagungan kekuasaan [4].

Perkembangan modernitas, kolonialisme, dan lahirnya negara bangsa membawa perubahan mendasar dalam cara sejarah diproduksi dan dipahami. Sejarah modern dalam kerangka negara bangsa menempatkan bangsa dan rakyat sebagai subjek utama yang menekankan kronologi linier, kausalitas rasional, dan penggunaan arsip dan metode ilmiah sebagai sumber legitimasi kebenaran. Dalam hal ini, sejarah berfungsi sebagai instrumen integrasi nasional dan pembentukan identitas kebangsaan bahkan sebagai legitimasi proyek pembangunan. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma filsafat sejarah Melayu dari yang bersifat kosmologis dan simbolik menuju pendekatan positivistik dan institusional [5].

Namun, transformasi ini tidak selalu berlangsung secara mulus dan reflektif. Dalam banyak kajian sejarah Melayu, terjadi kecenderungan untuk memisahkan secara tegas antara historiografi tradisional dan sejarah modern, seolah-olah keduanya berada dalam hubungan diskontinu. Hikayat sering direduksi sebagai karya sastra semata atau dianggap tidak relevan dalam kerangka sejarah ilmiah, sementara sejarah modern diposisikan sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan historis yang sah. Pendekatan semacam ini berpotensi mengabaikan dimensi filosofis dan kearifan epistemologis yang terkandung dalam tradisi sejarah Melayu [2].

Di sinilah letak celah penelitian yang menjadi dasar kajian ini. Hingga kini, masih terbatas penelitian yang membahas filsafat sejarah Melayu sebagai suatu sistem pemikiran yang utuh, terutama dalam menelaah

pergeseran ontologis, epistemologis, dan teleologis dari hikayat menuju sejarah negara bangsa modern. Sebagian besar studi cenderung bersifat deskriptif historis atau filologis, tanpa menggali filosofis dari perubahan cara masyarakat Melayu memahami hakikat sejarah, kebenaran, dan subjek historisnya. Kemudian, kajian sejarah modern di negara-negara Melayu kerap mengadopsi kerangka Barat tanpa dialog kritis dengan tradisi lokal. Akibatnya, terjadi ketegangan antara warisan historiografi tradisional yang sarat makna simbolik dengan tuntutan metodologis sejarah modern yang rasional dan objektif. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah filsafat sejarah Melayu benar-benar ditinggalkan, atau justru mengalami transformasi dan hadir dalam bentuk baru dalam narasi sejarah negara bangsa. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filsafat sejarah Melayu dengan menelusuri pergeseran paradigma dari historiografi hikayat menuju sejarah dalam kerangka negara bangsa modern.

## 2. Tinjauan Pustaka

Berbagai kajian telah dilakukan untuk menelusuri akar sejarah bangsa Melayu, namun belum tercapai kesepakatan tunggal yang dapat diterima secara universal [3]. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan kompleksitas sejarah migrasi dan pembentukan identitas Melayu. Secara umum, terdapat dua teori utama yang sering digunakan untuk menjelaskan asal usul bangsa Melayu, yakni Teori Yunnan dan Teori Nusantara [6]. Selain dua teori tersebut, terdapat pula pandangan tradisional yang mengaitkan asal usul sebagian kelompok Melayu dengan kisah pengikut Nabi Nuh yang mendarat di wilayah Sumatra pada masa banjir besar. Namun, pandangan terakhir ini lebih bersifat mitologis dan belum didukung bukti empiris yang kuat.

Teori Yunnan merupakan salah satu teori yang paling banyak diterima dan dikemukakan dalam berbagai kajian awal mengenai asal usul bangsa Melayu [7]. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Melayu berasal dari wilayah Yunnan di Asia Tengah, kemudian bermigrasi ke Kepulauan Melayu. Pandangan ini didukung oleh sejumlah peneliti yang melihat adanya kesamaan budaya, bahasa, dan artefak antara masyarakat Melayu dengan masyarakat di kawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara daratan. Salah satu argumen utama teori ini adalah penemuan kapak tua di Kepulauan Melayu yang memiliki kemiripan dengan alat-alat batu yang ditemukan di Asia Tengah. Kesamaan tersebut dianggap sebagai tanda adanya proses migrasi manusia dari wilayah daratan Asia menuju Nusantara.

Selain bukti arkeologis, pendukung Teori Yunnan juga mengemukakan kesamaan adat istiadat antara masyarakat Melayu dengan suku-suku tertentu di Asia Selatan dan Asia Tenggara daratan. Beberapa tradisi sosial masyarakat Melayu dinilai memiliki kemiripan dengan adat suku Naga di wilayah Assam yang berbatasan dengan India dan Myanmar. Dari segi linguistik, bahasa Melayu juga dianggap memiliki hubungan kekerabatan dengan bahasa-bahasa di kawasan Asia Tenggara daratan, termasuk wilayah Kamboja [8]. Hubungan ini diperkuat oleh dugaan bahwa penduduk Kamboja pada masa lampau berasal dari dataran Yunnan dan bermigrasi mengikuti aliran Sungai Mekong. Oleh karena itu, keterkaitan bangsa Melayu dengan Kamboja dianggap sebagai salah satu petunjuk adanya hubungan dengan wilayah Yunnan.

Berdasarkan Teori Yunnan, migrasi penduduk ke Kepulauan Melayu terjadi melalui beberapa gelombang besar. Gelombang awal dihubungkan dengan kehadiran kelompok Negrito yang dianggap sebagai penduduk paling awal di wilayah Nusantara. Kelompok ini diperkirakan telah mendiami Kepulauan Melayu sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bukti arkeologis, seperti penemuan di Gua Cha, Kelantan, menunjukkan bahwa kelompok ini telah hidup di kawasan tersebut sejak masa prasejarah. Ciri-ciri fisik kelompok Negrito, seperti kulit gelap, rambut keriting, dan postur tubuh pendek, masih dapat ditemukan pada sebagian masyarakat adat di Semenanjung Malaysia dan wilayah sekitarnya.

Seiring waktu, gelombang migrasi berikutnya melahirkan kelompok yang dikenal sebagai Melayu Proto. Migrasi Melayu Proto diperkirakan terjadi sekitar 2500 tahun sebelum Masehi [9]. Dibandingkan kelompok Negrito, masyarakat Melayu Proto telah menunjukkan tingkat peradaban yang lebih maju. Mereka mulai mengenal kegiatan bercocok tanam, pembuatan alat-alat rumah tangga, serta kerajinan sederhana. Kehidupan mereka masih bersifat semi-nomaden dan sangat bergantung pada alam sekitar. Periode ini sering dikaitkan dengan Zaman Batu Baru atau Neolitikum, yang menandai perkembangan teknologi dan pola hidup manusia prasejarah.

Gelombang migrasi berikutnya melahirkan kelompok Melayu Deutro yang diperkirakan datang sekitar 1500 tahun sebelum Masehi [9]. Kelompok ini memiliki tingkat kebudayaan yang lebih maju dibandingkan pendahulunya. Mereka telah mengenal penggunaan logam, khususnya besi, dalam kehidupan sehari-hari. Alat-

alat pertanian dan perburuan yang digunakan menunjukkan kemajuan teknologi yang signifikan. Melayu Deutro umumnya menetap di wilayah pesisir, lembah sungai, dan daerah yang subur, serta hidup secara menetap dalam komunitas yang terorganisir. Kehadiran mereka mendorong kelompok Melayu Proto untuk berpindah ke wilayah pedalaman.

Masyarakat Melayu Deutro telah mengenal sistem sosial yang lebih. Mereka hidup secara berkelompok dan memilih pemimpin yang berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin keagamaan. Sistem kepercayaan yang dianut pada masa ini umumnya bersifat animisme, di mana alam dan roh leluhur memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Kemampuan mereka dalam bidang pelayaran, pertanian, dan pengamatan alam menjadikan kelompok ini sebagai cikal bakal masyarakat Melayu yang dikenal pada masa sejarah. Bahasa-bahasa yang berkembang di Nusantara kemudian juga diyakini berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh kelompok ini.

Berbeda dengan Teori Yunnan, Teori Nusantara berpendapat bahwa bangsa Melayu berasal dan berkembang langsung di wilayah Nusantara tanpa melalui migrasi besar dari luar [10]. Pendukung teori ini berargumen bahwa tingkat peradaban masyarakat Melayu dan Jawa pada masa lampau menunjukkan proses perkembangan budaya yang panjang dan mandiri. Perkembangan tersebut dinilai tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat jika masyarakat Melayu merupakan pendatang baru dari wilayah lain. Dengan demikian, bangsa Melayu dianggap sebagai penduduk asli yang tumbuh dan berkembang di Nusantara.

Pendukung Teori Nusantara juga mengemukakan argumen linguistik dan antropologis. Bahasa-bahasa di Nusantara, bahasa Austronesia, memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan bahasa-bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Selain itu, penemuan fosil manusia purba seperti Homo Soloensis dan Homo Wajakensis di Pulau Jawa dianggap sebagai tanda keberlanjutan populasi manusia di wilayah tersebut. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa bangsa Melayu merupakan keturunan langsung dari manusia purba yang telah lama mendiami Nusantara dan membangun peradaban secara mandiri.

Dalam perspektif historiografi tradisional Melayu, asal usul bangsa Melayu juga dikaitkan dengan narasi yang bersifat simbolik dan genealogis. Dalam Sejarah Melayu, istilah Melayu disebut berasal dari nama sungai di wilayah Sumatra Selatan yang mengalir di sekitar Bukit Siguntang. Tempat ini digambarkan sebagai lokasi kemunculan tokoh-tokoh awal yang kemudian menjadi leluhur raja-raja Melayu di berbagai wilayah. Narasi ini menempatkan Melayu sebagai identitas yang berakar pada garis keturunan dan legitimasi politik. Seiring perkembangan waktu, pemaknaan Melayu tidak lagi semata-mata didasarkan pada keturunan, melainkan pada budaya, adat, dan agama. Masuknya Islam ke wilayah Sumatra dan Semenanjung Malaka turut mengubah definisi kemelayuan [11]. Identitas Melayu semakin dikaitkan dengan kepatuhan terhadap adat dan ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Melayu selain merujuk pada asal-usul biologis, tetapi pada cara hidup, nilai moral, dan keagamaan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) [12]. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian pada pengkajian konseptual dan filosofis terhadap cara pandang sejarah dalam tradisi Melayu serta transformasinya dalam negara bangsa modern. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam gagasan, paradigma, dan struktur pemikiran yang melandasi historiografi Melayu, baik dalam bentuk hikayat tradisional maupun sejarah modern yang berbasis metode ilmiah dan institusional.

Penelitian ini menempatkan filsafat sejarah sebagai kerangka analisis utama dengan menelaah dimensi ontologis, epistemologis, dan teleologis dari penulisan sejarah Melayu. Studi pustaka dilakukan peneliti untuk merekonstruksi pemikiran historis Melayu dengan menelusuri teks-teks klasik seperti hikayat dan membandingkannya dengan karya historiografi modern dan kajian akademik kontemporer. Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari buku klasik dan modern, artikel jurnal ilmiah, prosiding, serta karya-karya akademik yang membahas historiografi Melayu, filsafat sejarah, identitas bangsa, dan pembentukan negara bangsa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan filsafat sejarah, historiografi Melayu, hikayat, negara bangsa, dan identitas historis [13]. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk

mengkaji struktur narasi, konsep kebenaran, pandangan waktu, serta peran subjek sejarah dalam teks-teks hikayat dan karya historiografi modern. Kemudian, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema filosofis utama seperti konsep kekuasaan, legitimasi, identitas, dan tujuan penulisan sejarah. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan dibandingkan untuk merumuskan pola perubahan paradigma filsafat sejarah Melayu [14].

#### 4. Hasil dan Diskusi

##### 4.1. Hikayat sebagai Ontologi Sejarah Melayu

Dalam tradisi intelektual Melayu, hikayat bukan hanya diartikan sebagai bentuk sastra naratif, melainkan sebagai ontologis dalam memaknai sejarah [15]. Ontologi sejarah Melayu berangkat dari asumsi bahwa realitas masa lalu tidak berdiri netral dan objektif, tetapi terikat pada tujuan, nilai, dan simbol yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Hikayat menjadi medium utama untuk menyatukan historis dengan pandangan kosmologis tentang kekuasaan, agama, dan tatanan sosial [2]. Sejarah dalam perspektif Melayu tidak dihadirkan sebagai rangkaian fakta kronologis, melainkan sebagai struktur makna yang membimbing orientasi hidup masyarakat. Hikayat membentuk tentang asal-usul, legitimasi, dan tujuan keberadaan suatu komunitas politik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hikayat berarti memahami cara orang Melayu memandang realitas sejarah itu sendiri [3].

Hikayat merepresentasikan sejarah sebagai ruang simbolik yang sarat dengan unsur metafisis dan moral. Dalam hikayat, peristiwa masa lalu tidak dipisahkan dari dimensi sakral sehingga tindakan manusia selalu terhubung dengan kehendak ilahi atau tatanan kosmos. Raja, sebagai tokoh sentral selain berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai poros kosmologis yang menjaga keseimbangan dunia. Konsep-konsep seperti daulat, keturunan suci, dan legitimasi ilahiah menunjukkan sejarah dipahami sebagai manifestasi kehendak yang lebih tinggi. Dengan cara ini, hikayat menempatkan sejarah sebagai proses bukan perubahan temporal. Ontologi sejarah Melayu melalui hikayat menolak dikotomi tajam antara mitos dan fakta karena keduanya menyatu dalam konstruksi realitas historis [3].

Keberadaan unsur magis dan supranatural dalam hikayat sering disalahpahami sebagai tanda ketidakilmiahan sejarah Melayu. Namun, dari sudut pandang filsafat sejarah, unsur tersebut justru mengungkap cara berbeda dalam memahami eksistensi dan kausalitas. Hikayat tidak berusaha menjelaskan sebab-akibat secara rasional-empiris, melainkan secara simbolik dan normatif. Keajaiban, kesaktian, dan intervensi gaib berfungsi sebagai bahasa budaya untuk menjelaskan legitimasi kekuasaan dan keteladanan moral. Dalam hal ini, kebenaran sejarah tidak diukur melalui verifikasi arsip, tetapi melalui kesesuaian dengan nilai dan norma yang diakui masyarakat.

Hikayat menunjukkan bahwa sejarah Melayu bersifat istana-sentris, di mana pusat realitas sejarah berada pada lingkungan kerajaan [16]. Perhatian pada raja, silsilah, dan istana menunjukkan pandangan bahwa keberlangsungan dunia sosial bergantung pada stabilitas kekuasaan politik. Peristiwa di luar istana hanya dianggap relevan sejauh memiliki keterkaitan dengan nasib raja dan kerajaan. Hal ini menjelaskan bahwa ontologi sejarah Melayu bersifat hierarkis dan elitis, namun bukan tanpa fungsi sosial. Melalui penekanan pada figur penguasa, hikayat membangun kesadaran kolektif tentang loyalitas dan keteraturan.

Dalam perkembangan historiografi Islam di kawasan Melayu, hikayat mengalami integrasi dengan nilai-nilai keislaman tanpa kehilangan karakter ontologisnya. Islam tidak menghapus tradisi hikayat, tetapi memberi kerangka teologis baru bagi pemaknaan sejarah. Tokoh-tokoh agama, nabi, dan pahlawan Islam dihadirkan sebagai figur historis sekaligus simbol moral dan spiritual. Pergeseran istilah raja menjadi sultan menunjukkan transformasi makna kekuasaan dalam bingkai Islam. Namun, struktur ontologis hikayat tetap bertahan, yakni sejarah dipahami sebagai narasi keteladanan dan legitimasi.

Hikayat berfungsi sebagai instrumen pedagogis dalam mentransmisikan nilai sejarah kepada masyarakat. Penyampaian hikayat secara lisan dalam berbagai peristiwa sosial dan keagamaan menunjukkan bahwa sejarah diinternalisasi melalui pengalaman kolektif, bukan pembacaan individual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ontologi sejarah Melayu bersifat komunal, di mana makna masa lalu dibentuk dan diwariskan bersama. Hikayat tidak menuntut pembaca untuk bersikap kritis terhadap fakta, melainkan untuk menyerap nilai dan teladan. Sejarah menjadi bagian dari pembentukan etos sosial dan identitas budaya. Dengan cara ini, hikayat meneguhkan sejarah sebagai praksis kultural.

Untuk memahami posisi hikayat dalam ontologi sejarah Melayu, terdapat perbedaan antara fungsi naratif, simbolik, dan historisnya. Ketiga fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk makna sejarah. Hikayat tidak dapat direduksi menjadi satu dimensi saja karena kekuatannya justru terletak pada sintesis antara sastra, sejarah, dan filsafat hidup. Berikut ini merupakan karakteristik hikayat dalam kerangka ontologi sejarah Melayu. Yang ditunjukkan ada Tabel 1.

Tabel 1. Hikayat dalam Kerangka Ontologi Sejarah Melayu [2]

Dimensi Ontologis	Karakteristik Hikayat	Ontologis dalam Filsafat Sejarah Melayu
Subjek Sejarah	Hikayat menempatkan raja, sultan, dan elite istana sebagai pusat mutlak narasi sejarah. Tokoh-tokoh ini bukan sekadar figur politik, melainkan representasi kosmis yang dianggap memikul mandat ilahi. Narasi sejarah bergerak mengikuti perjalanan hidup, silsilah, dan tindakan penguasa. Rakyat hampir selalu hadir sebagai latar pendukung, bukan sebagai aktor historis.	Sejarah dipahami sebagai milik kekuasaan, bukan milik masyarakat luas. Eksistensi sosial rakyat memperoleh makna sejauh terhubung dengan figur penguasa. Ontologi sejarah Melayu bersifat hierarkis dan personalistik, di mana realitas historis diwujudkan melalui figur raja sebagai pusat makna dan legitimasi.
Konsep Kekuasaan	Kekuasaan dalam hikayat digambarkan bersifat turun-temurun, sakral, dan tidak lahir dari konsensus sosial. Raja memperoleh kekuasaan melalui darah keturunan, wahyu, mimpi, atau tanda-tanda gaib. Kekuasaan jarang dipersoalkan secara rasional karena dianggap sebagai bagian dari tatanan alam.	Realitas politik dipahami sebagai sesuatu yang memiliki legitimasi metafisis. Kekuasaan tidak diposisikan sebagai hasil kontrak sosial, melainkan sebagai kehendak kosmik. Ontologi sejarah Melayu memandang politik sebagai perpanjangan dari tatanan ilahi, sehingga kritik terhadap kekuasaan menjadi sesuatu yang tabu dan tidak lazim.
Historis	Hikayat tidak menyusun peristiwa berdasarkan kronologi ketat atau penanggalan yang presisi. Waktu diperlakukan lentur dan simbolik, sering kali melompat, berulang, atau dipadatkan. Penekanan utama bukan pada urutan peristiwa, melainkan pada makna moral yang dikandungnya.	Masa lalu dipahami sebagai simbol keteladanan dan peringatan etis. Sejarah tidak dimaksudkan untuk merekonstruksi apa yang terjadi secara faktual, tetapi untuk menghadirkan nilai yang relevan bagi masa kini. Ontologi waktu dalam sejarah Melayu bersifat moralistik, bukan progresif.
Ruang Sejarah	Istana, pusat kerajaan, dan wilayah kekuasaan menjadi ruang utama berlangsungnya peristiwa sejarah. Desa, ladang, dan ruang hidup rakyat jarang menjadi narasi. Ruang dalam hikayat bersifat politis dan simbolik, bukan geografis murni.	Dunia sosial dipersempit pada pusat kekuasaan. Ruang rakyat berada di pinggiran kesadaran historis. Ontologi ruang sejarah Melayu struktur sosial yang elitis, di mana makna historis hanya muncul di wilayah yang dekat dengan kekuasaan.
Kausalitas	Peristiwa sejarah dalam hikayat sering dijelaskan melalui mimpi, pertanda, kesaktian, doa, atau campur tangan makhluk gaib. Hubungan sebab-akibat rasional jarang digunakan sebagai penjelasan utama. Keajaiban diperlakukan sebagai sesuatu yang wajar.	Realitas sejarah dipahami sebagai transenden dan tidak sepenuhnya tunduk pada hukum rasional. Ontologi kausalitas sejarah Melayu bersifat spiritual, di mana kehendak ilahi lebih menentukan jalannya sejarah dibanding tindakan manusia semata.
Epistemologi	Pengetahuan sejarah diwariskan melalui cerita, hikayat, tradisi lisan, dan penyalinan teks yang bebas. Kebenaran tidak diverifikasi melalui metode, tetapi melalui penerimaan kolektif dan otoritas tradisi. Teks tidak bersifat final dan selalu terbuka untuk variasi.	Kebenaran sejarah diukur berdasarkan kesepakatan sosial dan nilai bersama, bukan korespondensi faktual. Ontologi pengetahuan sejarah Melayu menempatkan makna di atas fakta, dan stabilitas tradisi di atas akurasi empiris.
Fakta Mitos	Dalam hikayat, fakta historis dan mitos menyatu tanpa batas tegas. Tokoh nyata dapat hidup berdampingan dengan unsur magis dan legendaris. Mitos tidak dianggap kebalikan dari kenyataan, melainkan bagian dari kenyataan itu sendiri.	Realitas historis dipahami secara simbolik dan naratif. Ontologi sejarah Melayu tidak memisahkan dunia nyata dan dunia makna. Sejarah menjadi medium penyampaian kebenaran simbolik, bukan laporan empiris.
Identitas	Hikayat berfungsi meneguhkan identitas Melayu-Islam melalui silsilah, tokoh suci, dan asal-usul luhur. Identitas tidak dibangun melalui batas teritorial, melainkan melalui garis keturunan dan nilai budaya.	Sejarah membentuk kesadaran identitas komunal yang berbasis budaya dan agama. Ontologi identitas bersifat kolektif dan normatif, bukan individual. Individu menemukan jati dirinya melalui keterikatan pada tradisi dan komunitas.
Peran Islam	Islam terintegrasi secara menyeluruh dalam narasi kekuasaan dan sejarah. Raja sering digambarkan sebagai pelindung agama dan penerima legitimasi religius. Sejarah berfungsi sebagai media dakwah kultural.	Sejarah menjadi sarana legitimasi religius dan internalisasi nilai Islam. Ontologi sejarah Melayu memandang agama bukan sebagai aspek terpisah, melainkan realitas sosial dan politik.
Otoritas Teks	Hikayat bersifat anonim dan mengalami banyak perubahan karena penyalinan ulang. Tidak ada versi tunggal yang dianggap paling otoritatif. Tradisi lebih penting daripada keaslian teks.	Sejarah dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan teks final. Ontologi teks sejarah Melayu bersifat dinamis, kolektif, dan terbuka terhadap reinterpretasi lintas generasi.
Posisi Individu	Rakyat hadir sebagai latar cerita, pengikut setia, atau objek kekuasaan. Individu jarang memiliki suara historis yang otonom. Nilai utama adalah loyalitas, bukan agensi personal.	Eksistensi individu ditentukan oleh struktur kekuasaan dan tatanan sosial. Ontologi sejarah Melayu menempatkan individu sebagai bagian dari keseluruhan, bukan pusat narasi.

Melalui Tabel 1, diatas terlihat bahwa hikayat mengonstruksi sejarah dengan logika yang berbeda dari historiografi modern. Sejarah tidak disajikan untuk direkonstruksi secara faktual, melainkan untuk dipahami secara eksistensial.

#### 4.2. Filsafat Sejarah Melayu dalam Kerangka Negara Bangsa Modern

Masuknya Melayu ke dalam kerangka negara bangsa modern menandai perubahan mendasar dalam cara sejarah dipahami, ditulis, dan dimanfaatkan. Sejarah tidak lagi menjadi medium legitimasi istana atau transmisi nilai kosmologis, tetapi juga instrumen politik dan ideologis negara. Dalam hal ini, filsafat sejarah Melayu mengalami pergeseran orientasi dari makna simbolik menuju fungsi institusional. Negara bangsa menuntut sejarah yang seragam, terstandar, dan dapat dijadikan narasi bersama. Akibatnya, tradisi hikayat yang plural, fleksibel, dan terbuka terhadap mitos mulai dipandang problematis. Sejarah Melayu pun dipaksa bernegosiasi dengan tuntutan modernitas yang rasional dan birokratis.

Negara bangsa modern mensyaratkan sejarah sebagai identitas kolektif yang bersifat nasional, bukan kedaerahan atau kesultanan [17]. Dalam situasi ini, sejarah Melayu harus dilepaskan dari karakter region *centric* dan istana *centric* yang melekat kuat pada tradisi lama. Sejarah tidak berfungsi untuk mengagungkan raja tertentu, melainkan untuk membangun kesadaran kewargaan. Pergeseran ini membawa implikasi filosofis yang serius, karena makna sejarah berubah dari pengalaman sakral menjadi narasi politik. Negara menghendaki sejarah yang progresif, linier, dan berorientasi masa depan. Hal ini berlawanan dengan pandangan waktu tradisional Melayu yang bersifat simbolik dan moralistik [18].

Dalam filsafat sejarah modern, negara bangsa memposisikan sejarah sebagai alat rekayasa sosial [16]. Sejarah digunakan untuk menanamkan loyalitas, menyatukan perbedaan, dan membentuk imajinasi kolektif tentang asal-usul bangsa. Bagi masyarakat Melayu, kondisi ini menciptakan ketegangan antara tradisi historiografi lama dan kebutuhan baru. Hikayat tidak sepenuhnya ditolak, tetapi diseleksi dan direinterpretasi. Unsur mitos dilemahkan, sementara elemen yang dianggap rasional dan heroik diperkuat.

Modernisasi historiografi juga mengubah status kebenaran sejarah dalam tradisi Melayu. Jika sebelumnya kebenaran ditentukan oleh kesesuaian dengan nilai adat dan agama, kini ia diukur melalui metodologi dan verifikasi. Hal ini menciptakan jarak epistemologis antara masyarakat dengan sejarahnya sendiri. Sejarah menjadi milik akademisi, negara, dan institusi pendidikan, bukan lagi milik komunitas. Akibatnya, pengalaman historis rakyat Melayu sering kali tereduksi menjadi data dan periodisasi.

Namun demikian, negara bangsa tidak sepenuhnya menghapus tradisi sejarah Melayu. Sebaliknya, ia melakukan apropriasi selektif terhadap unsur-unsur tradisional. Hikayat, salasilah, dan simbol kerajaan diangkat kembali dalam bentuk yang telah disesuaikan. Tradisi tersebut dijadikan simbol budaya, bukan lagi sumber epistemologis utama. Di sinilah terjadi perubahan ontologis: sejarah Melayu bergeser dari “cara memahami realitas” menjadi “warisan budaya” [19]. Negara bangsa mengemas masa lalu sebagai identitas simbolik yang aman dan terkontrol. Proses ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan modern menata ulang makna sejarah.

Dalam negara bangsa, sejarah Melayu juga diposisikan sebagai bagian dari proyek pembangunan. Masa lalu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kemajuan dan modernitas. Narasi yang dianggap menghambat rasionalitas atau kemajuan cenderung disisihkan. Hal ini menimbulkan paradoks, karena filsafat sejarah Melayu justru menekankan keseimbangan, moralitas, dan harmoni. Negara bangsa lebih mengutamakan efisiensi, pertumbuhan, dan integrasi nasional. Tabel 2 menunjukkan transformasi sejarah melayu tradisional menuju sejarah dalam negara bangsa modern.

Tabel 2. Transformasi Sejarah Melayu Tradisional Menuju Sejarah dalam Negara Bangsa Modern [2]-[19]

Dimensi	Sejarah Melayu Tradisional	Sejarah dalam Negara Bangsa Modern
Subjek	Subjek sejarah dalam tradisi Melayu berpusat pada raja, sultan, dan lingkungan istana sebagai representasi kosmos sosial. Raja dipahami bukan sekadar pemimpin politik, melainkan poros ontologis yang menghubungkan dunia manusia dengan tatanan ilahi dan alam semesta. Keberadaan rakyat memperoleh makna sejauh terhubung dengan figur penguasa. Dengan demikian, sejarah dipersonifikasikan melalui figur tunggal yang dianggap memiliki legitimasi sakral.	Negara bangsa memindahkan subjek sejarah dari individu penguasa ke entitas abstrak bernama bangsa dan negara. Sejarah tidak lagi bertumpu pada figur personal, tetapi pada kolektivitas warga negara. Subjek sejarah menjadi impersonal dan institusional. Negara diposisikan sebagai aktor utama yang berkelanjutan melampaui rezim atau pemimpin tertentu.
Fungsi	Sejarah berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan dan pembentukan keteladanan moral. Hikayat menegaskan bahwa kekuasaan raja sah karena berasal dari keturunan luhur, wahyu, atau tanda-tanda ilahi. Fungsi pedagogisnya bersifat etis dan simbolik, menanamkan nilai kesetiaan, kepatuhan, dan harmoni sosial. Sejarah tidak dimaksudkan untuk kritik,	Dalam negara bangsa, sejarah difungsikan sebagai alat integrasi nasional dan pembentukan identitas kebangsaan. Sejarah dijadikan instrumen politik-kultural untuk menyatukan masyarakat yang beragam. Fungsi legitimatif bergeser dari raja ke negara dan konstitusi. Sejarah juga berperan sebagai medium pembentukan kesadaran

	melainkan untuk stabilitas. Kebenaran sejarah ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai moral, adat, dan kosmologi religius. Fakta tidak berdiri sendiri, melainkan melebur dengan simbol, mitos, dan pesan etis. Kebenaran bersifat normatif dan diterima secara kolektif. Yang penting bukan “apa yang benar-benar terjadi?”, melainkan “apa yang patut diyakini”.	kewargaan dan nasionalisme. Kebenaran sejarah didefinisikan melalui metode ilmiah, verifikasi sumber, dan rasionalitas akademik. Sejarah dipisahkan dari mitos dan simbol. Validitas ditentukan oleh bukti tertulis dan arsip. Kebenaran bersifat prosedural dan terbuka untuk diuji ulang secara kritis.
Konsep kebenaran	Waktu dipahami secara siklis, simbolik, dan bermuatan moral. Masa lalu tidak dipisahkan secara tegas dari masa kini, melainkan hadir sebagai teladan dan peringatan. Sejarah tidak bergerak menuju kemajuan linear, tetapi menuju keseimbangan dan keharmonisan. Pengulangan nilai dianggap lebih penting daripada perubahan.	Negara bangsa mengadopsi pandangan waktu linear dan progresif. Sejarah dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang bergerak maju menuju masa depan. Konsep kemajuan, pembangunan, dan modernisasi menjadi orientasi utama. Masa lalu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kemajuan nasional.
Pandangan waktu	Makna sejarah bersumber dari hikayat, adat, tradisi lisan, dan kosmologi religius. Bahasa naratif dan simbolik menjadi medium utama pembentukan makna. Sejarah hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Teks tidak bersifat final dan terbuka terhadap tafsir ulang.	Makna sejarah ditentukan oleh arsip, dokumen resmi, dan institusi negara seperti sekolah dan akademi. Sejarah menjadi wacana formal yang distandardisasi. Interpretasi dikendalikan oleh kurikulum dan otoritas keilmuan. Ruang tafsir masyarakat menjadi terbatas.
Sumber	Tujuan sejarah adalah terciptanya harmoni kosmis antara manusia, kekuasaan, alam, dan Tuhan. Sejarah membimbing manusia agar hidup sesuai dengan tatanan moral dan adat. Stabilitas dan keseimbangan lebih diutamakan daripada perubahan radikal. Sejarah berfungsi sebagai orientasi hidup.	Tujuan akhir sejarah adalah mendukung pembangunan nasional dan keberlanjutan negara. Sejarah diarahkan untuk memperkuat legitimasi proyek modernitas. Nilai instrumental lebih dominan daripada nilai kontemplatif. Sejarah menjadi sarana, bukan tujuan pada dirinya sendiri.
Tujuan akhir		

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa negara bangsa tidak hanya mengubah isi sejarah Melayu, tetapi juga filosofisnya. Sejarah dipindahkan dari ruang makna ke ruang administrasi pengetahuan. Hal ini berdampak pada cara masyarakat memahami identitas kemelayuan. Identitas tidak lagi dibentuk melalui narasi sakral dan lisan, melainkan melalui kurikulum dan buku teks. Sejarah menjadi seragam, sementara pengalaman kehilangan ruang ekspresi. Dalam hal ini, filsafat sejarah Melayu menghadapi tantangan homogenisasi.

Modernitas juga membawa perubahan dalam subjek sejarah Melayu. Jika sebelumnya rakyat berada di pinggiran narasi, negara bangsa berusaha menjadikannya pusat. Namun, upaya ini sering bersifat formal dan simbolik. Rakyat hadir sebagai “massa”, bukan sebagai subjek historis yang hidup. Sejarah rakyat Melayu tetap kurang mendapat ruang reflektif. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan bentuk belum tentu diikuti perubahan makna. Dalam globalisasi, sejarah Melayu menghadapi tekanan baru berupa standar universal [20]. Negara bangsa dituntut menyesuaikan narasi sejarahnya dengan wacana global. Akibatnya, ciri lokal sering kali terpinggirkan. Sejarah Melayu dipaksa berbicara dalam bahasa modernitas global. Namun, di sinilah muncul peluang reflektif bagi filsafat sejarah Melayu. Tradisi hikayat dapat dibaca ulang sebagai kritik terhadap positivisme sejarah modern. Ia menawarkan cara lain memahami waktu, kekuasaan, dan identitas.

Filsafat sejarah Melayu dalam negara bangsa modern seharusnya tidak dilihat sebagai pertentangan biner antara tradisi dan modernitas. Sebaliknya, perlu dipahami sebagai ruang dialog kritis. Tradisi tidak harus ditinggalkan, tetapi direfleksikan secara filosofis. Negara bangsa dapat memanfaatkan hikayat bukan sebagai data, melainkan sebagai sumber makna. Dengan pendekatan ini, sejarah Melayu dapat kembali berfungsi sebagai orientasi hidup. Sejarah tidak hanya menjelaskan masa lalu, tetapi juga membimbing masa depan dalam membentuk komunitas [21].

## 5. Kesimpulan

Kajian menunjukkan bahwa filsafat sejarah Melayu memiliki karakter ontologis, epistemologis, dan teleologis yang berakar kuat dalam tradisi hikayat sebagai medium utama pemaknaan masa lalu. Hikayat bukan hanya merekam peristiwa, melainkan membentuk sejarah sebagai ruang simbolik yang menyatukan kekuasaan, agama, moralitas, dan kosmologi, di mana kebenaran ditentukan oleh nilai dan legitimasi kolektif, bukan oleh verifikasi empiris semata. Masuknya Melayu ke dalam kerangka negara bangsa modern membawa pergeseran paradigma yang mendasar: sejarah direduksi dari praksis makna menjadi instrumen institusional, dari narasi sakral-komunal menuju wacana rasional-administratif. Pergeseran ini selain mengubah isi dan metode penulisan sejarah, tetapi juga menggeser cara masyarakat Melayu memahami identitas, waktu, dan tujuan sejarah itu sendiri. Negara bangsa melakukan seleksi dan apropriasi terhadap tradisi hikayat menjadikannya simbol budaya yang terkontrol, sementara fungsi ontologis dan epistemologisnya semakin terpinggirkan. Namun demikian, penelitian ini menjelaskan bahwa filsafat sejarah Melayu tidak sepenuhnya lenyap, melainkan berada dalam posisi dialogis dan kritis terhadap historiografi modern. Tradisi hikayat tetap menyimpan potensi reflektif untuk mengkritik positivisme sejarah, menawarkan cara alternatif dalam memahami relasi antara manusia, kekuasaan, dan makna sejarah. Oleh karena itu, filsafat sejarah Melayu seharusnya tidak diposisikan sebagai warisan masa lalu yang

usang, melainkan sebagai sumber pemikiran yang relevan untuk memperkaya pemahaman sejarah dalam negara bangsa modern.

## Referensi

- [1] H. Sitanggang, Fatonah, Nurhayati, Y. Pardede, and D. Defrianti, "The Role of Malay Customs in Building Cultural Identity," *Pros. Semin. Nas. Hum.*, vol. 3, pp. 16–25, 2023, [Online]. Available: <https://www.conference.unja.ac.id/SNH>
- [2] A. A. Fajarul, L. Pratiwi, A. T. Haqqul Yaqin, I. Humayroh, and A. Saputra, "Analisis Hikayat Sebagai Sumber Historiografi Islam di Indonesia," *Al-Isnad J. Islam. Civiliz. Hist. Humanit.*, vol. 5, no. 02, pp. 35–51, 2024, doi: 10.22515/isnad.v5i02.9693.
- [3] P. P. Komunikasi, F. P. Antarabangsa, and U. Nihon, "SIAPAKAH MELAYU? ANALISIS NARATIF IDENTITI ORANG MELAYU DI MEDAN, SUMATERA UTARA (WHO IS MALAY? NARRATIVE ANALYSIS OF MALAY PEOPLE IN MEDAN, NORTH SUMATRA) yang menggunakan sekurangnya 50 perkataan yang mirip dengan bahasa Melayu.," *Quantum J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 5, no. 1, pp. 82–95, 2024.
- [4] R. Handayani, "Sastra, Perempuan, dan Istana Dalam Kronik Melayu Sulalatus Salatin," *Bul. Al-Turas*, vol. 26, no. 1, pp. 103–120, 2020, doi: 10.15408/bat.v26i1.14410.
- [5] A. Prayogi, "Paradigma Positivisme dan Idealisme dalam Ilmu Sejarah: Tinjauan Reflektif Terhadap Posisi Sejarah Sebagai Ilmu," *Tamaddun J. Kebud. dan Sastra Islam*, vol. 21, no. 1, pp. 75–90, 1970, doi: 10.19109/tamaddun.v21i1.8732.
- [6] B. Melayu, D. I. Nusantara, M. R. Alfarizi, C. A. Wulandari, and N. Maharani, "Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang," *J. Multidisipliner Kapalamada*, vol. 2, no. 4, pp. 217–226, 2023.
- [7] M. Mustado, R. Setyadiharjo, D. Irawan, and R. Patria, "Lipatan Alam Bahari di Dalam Pantun Melayu," *Edusiana J. Ilmu Pendidik.*, vol. 1, no. 2, 2023, doi: 10.70437/edusiana.v1i2.234.
- [8] C. Sigit Widayastuti, "Suatu Tinjauan Linguistik Historis Komparatif Indonesian as a Cultural Product and Part of Austronesian Languages: Historical Comparative Linguistic," vol. 3, no. 1, pp. 1–13, 2024, [Online]. Available: <https://online-journal.unja.ac.id/kal>
- [9] D. I. Nusantara, "d0d0l,+Journal+manager,+2+Mugiyono (1)," pp. 23–45, 2016.
- [10] Lukmanul Hakim, "Teori kedatangan islam di melayu nusantara," vol. 3798, p. 16, 2018.
- [11] I. S. Nor Asiah, Y. Mohd Othman, and K. Hafizah, "Persidangan antarabangsa pengajian islamiyyat kali ke-3 (irsyad2017) 3," *Persidang. antarabangsa Pengaj. Islam. kali ke-3*, vol. 3, pp. 445–464, 2014, [Online]. Available: <http://conference.kuis.edu.my/irsyad/images/eproceeding/2017/1015.pdf>
- [12] M. Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY J. Educ.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–12, 2021, doi: 10.52121/alacrity.v1i2.20.
- [13] R. Muannif, A. Suhar, U. Bahrul, and M. Fauzi, "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah (The importance of application of literature review in scientific research)," *J. Masohi*, vol. 02, no. 01, pp. 42–51, 2021, [Online]. Available: <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>
- [14] Yuli Azmi Rozali, "Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah," *Direktori J. Elektron. Univ. Esa Unggul*, vol. 19, no. 1, 2022.
- [15] F. F. Jambak, "FILSAFAT SEJARAH HAMKA: Refleksi Islam dalam Perjalanan Sejarah," *J. Theol.*, vol. 28, no. 2, pp. 255–272, 2018, doi: 10.21580/teo.2017.28.2.1877.
- [16] B. Darmawan, M. Al Huzaini, F. P. Azizah, Y. Riza, and A. T. Hidayat, "Kritik Terhadap Naskah Hikayat Masyhud Hakk Dalam Perspektif Ilmu Sejarah," *MALAY Stud. Hist. Cult. Civiliz.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–10, 2023.
- [17] H. P. Agus Susilo, Yusuf Budi, M. Ari Kuwoto, "Pentingnya Kesadaran Sejarah dalam Membangun Identitas dan Karakter Bangsa," *SINDANG J. Pendidik. Sej. dan Kaji. Sej.*, vol. 7, no. 1, 2025.
- [18] A. Maulana, "Pengaruh Islam terhadap Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Melayu," *Nihayah J. Islam. Stud.*, vol. 1, no. 2, pp. 209–225, 2025, [Online]. Available: <https://journal.an-nur.org/index.php/nihayah>
- [19] Mamik Indrawati and Y. I. Sari, "Jurnal penelitian dan pendidikan IPS," *J. Penelit. dan Pendidik. ips*, vol. 1, no. 18, pp. 40–48, 2024.
- [20] A. C. Jaya, "Ave at:," pp. 68–84.
- [21] M. R. Akbar, "Communication Development People in the Revolutionary Era Industry 4.0 & Covid-19," *L. Journal, "Communication Development People in the Revolutionary Era,"* vol. 1, no. 1, pp. 11–22, 2023.